

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

2018

PERBUP NOMOR 01 TAHUN 2018 8 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan APBD Kabupaten Lampung Timur dapat berjalan efektif, efisien, tertib, transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu disusun peraturan yang mengatur mengenai transaksi keuangan

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No. 12 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, PP 55 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP Nomor 39 Tahun 2007, PP No 71 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permen PU No. 1/PRT/M/2014, Perda No. 18 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Asas dan tujuan, transaksi non tunai, nomor rekening, pembayaran perjalanan dinas, pembinaan, pengawasan dan sanksi

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2018

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PNS

2018

PERBUP NOMOR 02 TAHUN 2018 27 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selain jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional tertentu diperlukan jabatan pelaksana sebagai dasar dalam perencanaan dan penempatan pegawai
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No. 12 Tahun 1999, UU No.5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 53 Tahun 2010, PP 18 Tahun 2016, PP No 11 Tahun 2017 Permen PAN RB No. 25 Tahun 2016, Perda No. 18 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Maksud dan tujuan, nomenklatur jabatan pelaksana, formasi jabatan, pengangkatan dan pemindahan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Februari 2018

TUNJANGAN KHUSUS AJUDAN PENGAWAL PRIBADI BUPATI, WAKIL
BUPATI DAN PENGAMAN KANTOR BUPATI LAMPUNG TIMUR

2018

PERBUP NOMOR 03 TAHUN 2018 4 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS AJUDAN PENGAWAL PRIBADI
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR DAN PENGAMAN
KANTOR BUPATI LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - bahwa tugas pokok dan fungsi ajudan Bupati dan Wakil Bupati serta petugas Keamanan Kantor Bupati Lampung Timur maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No. 12 Tahun 1999, UU No.33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda No 12 Tahun 2017
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Tunjangan khusus, kriteria pemberian tunjangan khusus, penganggaran dan besaran tunjangan khusus.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Februari 2018

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

2018

PEBUP NOMOR 04 TAHUN 2018 13 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menentukan criteria dan aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 53 Tahun 2010, Permendagri No. 61 Tahun 2007, Permendagri No 13 Tahun 2006, Perda No 02 Tahu 2009, Perbup No. 06 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Kewajiban pegawai, pemberian tambahan penghasilan, penganggaran, pengawasan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Mei 2017

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
2018

PERBUP NOMOR 05 TAHUN 2018 16 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - bahwa guna menunjang disiplin dan tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu diberikan stimulus kepada pengelola keuangan daerah
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No.01 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 19 Tahun 2016, Permen PAN & RB No. 63 Tahun 2011, Permen PAN & RB No 39 Tahun 2013, Permendagri No 13 Tahun 2006, Perda No 02 Tahu 2009, Perda No. 18 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pengelolaan Keuangan Daerah, Penganggaran, Besaran, Tata Cara Perhitungan dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Kepada Pengelola Keuangan Daerah;
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Februari 2018

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DI RSUD SUKADANA

2018

PEBUP NOMOR 06 TAHUN 2018 18 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RSUD SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa tambahan penghasilan diberikan untuk meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan umum kepada pegawai negeri sipil berdasarkan prinsip memenuhi kriteria dan kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan publik yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan merupakan tempat kerja yang memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan kerja
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, PP No. 23 Tahun 2005 UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 11 Tahun 2017, Perpres No. 4 Tahun 2017, Permendagri No. 61 Tahun 2007, Permendagri No 13 Tahun 2006, Perda No 02 Tahun 2009, Perda No. 18 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup dan Penugasan;

Pemberian Tambahan Penghasilan; Penetapan dan Komponen Perhitungan Besaran Tambahan Penghasilan; Penilaian Kehadiran; Pembayaran dan Pajak; Monitoring dan Evaluasi;

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 29 Mei 2018

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI PPPK

2018

PEBUP NOMOR 07 TAHUN 2018 23 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai dan berkualitas pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kondisi wilayah dan dengan terbatasnya tenaga kesehatan maka perlu melakukan pengangkatan tenaga pelayanan kesehatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 36 Tahun 2014, Permenkes No. 7 Tahun 2013, Perda No. 18 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Mekanisme Pengangkatan dan Penempatan, Perjanjian Kontrak Kerja, Kewajiban dan Hak, Pembiayaan dan Penggajian, Pembinaan dan Pengawasan, Pelanggaran Disiplin, Mekanisme Pemberhentian dan Perpanjangan;

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Februari 2018

PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 42 TAHUN 2017

2018

PEBUP NOMOR 08 TAHUN 2018 5 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/10395/OTDA perihal Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan, bahwa dalam hal Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu membutuhkan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya, maka Kepala Daerah dapat membentuk koordinator wilayah kecamatan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 44 Tahun 2008, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, Permen PAN&RB No. 25 Tahun 2016, Permendagri No. 12 Tahun 2017 Perda No. 18 Tahun 2016, Perbup No. 42 Tahun 2017
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Diantara Pasal 109 dan Pasal 110 disisipkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 109 A, 109 B, Pasal 109 C dan Pasal 109 D

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Februari 2018

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2018

PEBUP NOMOR 09 TAHUN 2018 11 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ABSTRAK : - Bahwa guna terarahnya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur diperlukan indikator kinerja utama sebagai tolak ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 29 Tahun 2014, Permen PAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 Perda No. 15 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Tujuan dan ruang lingkup, kegunaan indikator kinerja utama, penetapan indikator kinerja utama.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Februari 2018

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

2018

PERBUP NOMOR 10 TAHUN 2018, 11 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menentukan criteria dan aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 18 Tahun 2016, PP No 53 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permen PAN & RB No 63 Tahun 2011, Perda No 18 Tahun 2016, Perda No. 12 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Kewajiban pegawai; tambahan penghasilan; pembayaran tambahan penghasilan; penghargaan; pengawasan
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Februari 2018

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2018

PEBUP NOMOR 11 TAHUN 2018 19 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN RINCIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN SERTA PELAPORAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Perpres No. 107 Tahun 2017, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Permenkeu No 50/PMK.07/2017, Permendes No 126 Tahun 2017, Permenkeu No. 199/PMK.07/2017, Permenkeu No 226/PMK.07/2017, Perda No 18 Tahun 2016, Perda No. 12 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Penetapan rincian dana desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pelaporan dana desa, sanksi
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Februari 2018

PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN

2018

PEBUP NOMOR 12 TAHUN 2018 16 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Timur salah satu upaya adalah meningkatkan kesehatan Ibu dan Anak melalui program jaminan persalinan
- Untuk memberikan arahan dan panduan yang jelas terhadap pengelolaan dan penggunaan dana jampersal di Kabupaten Lampung Timur maka perlu ditetapkan Perbup tentang Juknis penggunaan dana jampersal
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No.36 Tahun 2009, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, Permenkes No. 61 Tahun 2017, Permenkes No. 97 Tahun 2014, Permenkes No 53 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Tujuan, Kebijakan Operasional, Sasaran Pelayanan dan Ruang Lingkup
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Februari 2018

PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

2018

PEBUP NOMOR 13 TAHUN 2018 30 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

- ABSTRAK : - Bahwa pembangunan desa merupakan bagian integral pembangunan daerah, oleh sebab itu harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pembangunan desa serta penguatan pemerintahan desa, ADD harus dilaksanakan secara tepat guna, tepat sasaran dan tepat manfaat
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 06 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permenkeu No. 49/PMK.07/2016, Permendagri No. 113 Tahun 2014
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Tujuan, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Peruntukan Alokasi Dana Desa; Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa; Mekanisme penyaluran dan pencairan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
- diundangkan 19 Februari 2018

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL FKTP

2018

PEBUP NOMOR 13.a TAHUN 2018 10 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

- ABSTRAK : - Bahwa agar pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP milik Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan pengaturan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 40 Tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009, UU No 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 12 Tahun 2013, Perpres No. 32 Tahun 2014, Permenkes No. 69 Tahun 2013, Permenkes No. 71 Tahun 2013, Permenkes No 21 Tahun 2016, Perda No 02 Tahun 2009, Perda No 18 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
 - Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pengelolaan dana kapitasi, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,

pengorganisasian pengelolaan dana kapitasi, pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi, pertanggungjawaban dan pengawasan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Februari 2018

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2018

PERBUP NOMOR 14 TAHUN 2018 42 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

- ABSTRAK :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah berdasarkan alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014, Permendagri No 113 Tahun 2014, Perka LKPP No 13 Tahun 2013, Perda No 5 Tahun 2003, Perda No 24 Tahun 2007, Perbup No 12 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tujuan dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sumber dana dan perhitungan alokasi, prioritas penggunaan, mekanisme penyaluran dan pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Februari 2018

PROGRAM GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA BERBASIS MASYARAKAT DAN GERAKAN MASYARAKAT BANGUN KAWASAN INDAH TERPADU

2018

PERBUP NOMOR 15 TAHUN 2018 34 HALAMAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PROGRAM GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA BERBASIS MASYARAKAT DAN GERAKAN MASYARAKAT BANGUN KAWASAN INDAH TERPADU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat perlu mengalokasikan dana pembangunan melalui mekanisme bantuan yang diberikan melalui pemerintahan desa dan masyarakat.
 - Dana pembangunan perlu dialokasikan berdasarkan azas adil dan merata melalui program gotong royong membangun desa berbasis masyarakat dan gerakan masyarakat bangun kawasan indah terpadu Kabupaten Lampung Timur
 -
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
- UU No 12 Tahun 1999, UU No 1 Tahun 2014, UU No 33 Tahun 2004, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, Permendagri No 113 Tahun 2014, Permendagri No 114 Tahun 2014, Perda No 12 Tahun 2016, Perda No 24 Tahun 2007,
 - Perbup No 12 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Jenis kegiatan, sasaran lokasi dan pendanaan,

organisasi pelaksana, mekanisme pencairan dan penyaluran dana, monitoring pengawasan dan pelaporan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Februari 2018

PERUBAHAN PERBUP NO 60 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT

2018

PERBUP NO 16 TAHUN 2018 4 HALAMAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah perlu diatur kembali.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 33 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, Perda No 18 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Perbup Nomor 60 Tahun 2018 diubah, pasal-pasal yang diubah yaitu Pasal 8, Pasal 9, Pasal 76, dan Pasal 77
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2018

HONORARIUM PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

2018

PERBUP NO 17 TAHUN 2018 5 HALAMAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas dan efisiensi pendayagunaan pegawai BLUD Non PNS di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana, sehingga besaran honorarium pegawai BLUD Non PNS dipandang belum layak sehinggaperlu dilakukan perubahan
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2009, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 23 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 61 Tahun 2007, Perda No 1 Tahun 2003, Perbup No 32 Tahun 2012, Perbup No 49 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan besaran honorarium bulanan pegawai BLUD Non PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2018

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN
2018

PERBUP NO 18 TAHUN 2018 18 HALAMAN

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam hal penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dipandang perlu mengatur tata cara penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan Peraturan Bupati
-
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1985, UU No 12 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 2009, UU No 28 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, Permendagri No 80 Tahun 2015, Perda No 16 Tahun 2011, Perda No 16 Tahun 2013.
-
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tata cara penghapusan piutang PBB-P2 dan Fasilitas pelaksanaan Perbup ini.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2018

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN

2018

PERBUP NO 19 TAHUN 2018 6 HALAMAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ABSTRAK : - Bahwa sistem pengendalian intern terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang harus dibangun dan dilaksanakan sehingga prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terpenuhi

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 60 Tahun 2008, Permendagri No 23 Tahun 2007, Pemnen PAN RB No 15 Tahun 2009, Permendagri No 70 Tahun 2011, Permen PAN RB No 40 Tahun 2012, Permendagri No 19 Tahun 2016, Perda No 02 Tahun 2009, Perda No 18 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur, penguatan efektifitas penyelenggaraan SPIP

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2018

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN

2018

PERBUP NO 20 TAHUN 2018 10 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa pengawasan intern pemerintahan merupakan salah satu unsur manajemen pemerintahan yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
- Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan pejabat fungsional pengawas yang professional berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menyusun kode etik APIP dilingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 60 Tahun 2008, Permendagri No 23 Tahun 2007, Pemnen PAN RB No 15 Tahun 2009, Permendagri No 70 Tahun 2011, Permen PAN RB No 40 Tahun 2012, Permendagri No 19 Tahun 2016, Perda No 02 Tahun 2009, Perda No 18 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Latar belakang, prinsip-prinsip perilaku, aturan perilaku
penegakan kode etik

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 13
Maret 2018

SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

2018

PERBUP NOMOR 21 TAHUN 2018 93 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIGAP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara dipandang perlu menyusun suatu pedoman dalam pengelolaan data kepegawaian
- Bahwa untuk tersedianya informasi kepegawaian yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, faktual dan berkesinambungan berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang SIGAP
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 14 Tahun 2008, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 61 Tahun 2010, PP No 11 Tahun 2017, Kepmendagri No 17 Tahun 2000, Perka BKN No 18 Tahun 2011, Perda No 18 Tahun 2016, Perda No 12 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Maksud, tujuan, sasaran dan ruang lingkup SIGAP, Data informasi kepegawaian, pengelola SIGAP, Tugas pengelola SIGAP, Mekanisme pelaksanaan SIGAP, kerahasiaan data kepegawaian, sarana prasarana, layanan informasi data kepegawaian, pembinaan, evaluasi pelaporan dan pembiayaan

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2018

PENERBITAN PENYAMPAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

2018

PERBUP NOMOR 22 TAHUN 2018 7 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT PBB-P2 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Perda Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT PBB-P2 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU Nomor 12 Tahun 1985, UU No 12 Tahun 1999, UU No 23 Tahun 2014, UU No 25 Tahun 2009, UU No 28 Tahun 2009, PP No 58 Tahun 2005, Perda No 16 Tahun 2011, Perda No 16 Tahun 2013, Perda No 18 Tahun 2016
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Standar operasional prosedur tata cara penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2)
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2018

KODE ETIK PERILAKU PEGAWAI

2018

PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2018 24 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu ditetapkan kode etik dan pedoman perilaku pegawai

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999, UU No 5 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, UU No 42 Tahun 2004, , PP No 42 Tahun 2004, BKN No 21 Tahun 2016, PP No 60 Tahun 2008, PP No 53 Tahun 2010, PP No 46 Tahun 2011, PP No 18 Tahun 2016, PP No 11 Tahun 2017, PerkaBKN No 21 Tahun 2010, Perda No 18 Tahun 2016, Perbup No 31 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Maksud, tujuan dan ruang lingkup, nilai-nilai dasar bagi PNS, kode etik PNS, pedoman perilaku, kode etik khusus OPD, pelanggaran kode etik, informasi pelanggaran kode etik, penegakan kode etik, majelis kode etik, tugas dan kewajiban majelis kode etik.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2018

AKUISISI ARSIP STATIS

2018

PERBUP NOMOR 24 TAHUN 2018 18 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN AKUISISI ARSIP STATIS PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dilakukan penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan melalui kegiatan akuisisi arsip statis
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 43 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 28 Tahun 2012, Perka ANRI No 31 Tahun 2011, Perda No 18 Tahun 2016, Perbup No 37 Tahun 2014, Perbup No 05 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Maksud dan tujuan, pelaksanaan akuisisi arsip statis
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2018

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

2018

PERBUP NOMOR 25 TAHUN 2018 6 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi penyelenggara negara pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk melaporkan kekayaannya.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999, UU No 30 Tahun 2002, UU No 5 Tahun 2014, Perda No 18 Tahun 2016, Peraturan KPK No 7 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Wajib lapor, menyampaikan LHKPN, pengelola LHKPN
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2018

JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

2018

PERBUP NOMOR 27 TAHUN 2018 9 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan urusan pengawasan, perlu menetapkan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 33 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 16 Tahun 1994, PP No 79 Tahun 2005, PP No 18 Tahun 2016, Kepres No 87 Tahun 1999, Kepres No 116 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Mengubah Pasal 2 jabatan fungsional PNS pada organisasi daerah di lingkungan pemerintah daerah
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2018

PERBUP NOMOR 28 TAHUN 2018 5 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2019

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- Agar pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 dapat terencana, terarah, erpadu dan berkesinambungan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan Rencana APBD Tahun 2019, maka perlu ditetapkan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 12 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, UU No 6 Tahun 2014, PP No 65 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2008, PP No 18 Tahun 2016, Pepres No 2 Tahun 2015, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No 22 Tahun 2018, Permendagri No 38 Tahun 2018, Perda No 10 Tahun 2010, Perda No 04 Tahun 2012, Perda No 15 Tahun 2016, Perda No 18 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
RKPD Kabupaten Lampung Timur sebagai dokumen tahunan perencanaan pembangunan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaanya serta prakiraannya dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif baik bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 16 Julii 2018

PENGHARGAAN BAGI PNS

2018

PERBUP NOMOR 29 TAHUN 2018 ; 4 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa salah satu wujud kepedulian dan penghargaan yang tinggi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur yang telah mencapai batas usia pensiun dipandang perlu diberikan penghargaan
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 8 Tahun 1974, UU No 12 Tahun 1999, UU No 23 Tahun 2014, UU No 5 Tahun 2014, PP No 99 Tahun 2000, PP No 12 Tahun 2002, PP No 63 Tahun 2009, PP No 11 Tahun 2007, Perda No 18 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Kebijakan pemberian penghargaan bagi PNS yang telah mencapai batas usia pension, dasar dan persyaratan pemberian penghargaan bagi PNS yang telah mencapai batas usia pensiun; prosedur pemberian penghargaan bagi PNS yang telah mencapai batas usia pensiun; bentuk penghargaan; pembiayaan
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 25 Julii 2018

ALOKASI DANA DESA (ADD) KHUSUS

2018

PERBUP NOMOR 30 TAHUN 2018, 8 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KHUSUS KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- Bahwa pembangunan desa merupakan bagian integral pembangunan daerah oleh sebab itu harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat;
 - Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pembangunan desa serta penguatan pemerintahan desa, Alokasi Dana Desa (ADD) Khusus harus dilaksanakan secara tepat guna, tepat sasaran dan tepat manfaat
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 06 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014, Perpres No 54 Tahun 2010, Perpres No 04 Tahun 2015, Permendagri No 05 Tahun 2007, Permendagri No 7 Tahun 2007, Permendagri No 113 Tahun 2014, Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013, Perda No 05 Tahun 2003, Perda No 24 Tahun 2007, Perda No 02 Tahun 2009, Perda No 13 Tahun 2016, Perda No 12 Tahun 2017, Perbup No 12 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Tujuan ADD; peruntukan ADD Khusus; penetapan rincian ADD Khusus; mekanisme penyaluran dan pencairan; pembinaan dan pengawasan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

2018

PERBUP NOMOR 31 TAHUN 2018, 11 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : - Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2017

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 20 Tahun 2003, UU No 15 Tahun 2004, UU No 6 Tahun 2014, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 109 Tahun 2000, PP No 24 Tahun 2004, PP No 55 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 65 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 71 Tahun 2010, Permendagri No 64 Tahun 2013, Permendagri No 31 Tahun 2016, Permendagri No 11 Tahun 2017, Perda No 02 Tahun 2009, Perda No 25 Tahun 2016, Perda No 11 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas : pendapatan, belanja, dan pembiayaan

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2018

PERBUP NOMOR 32 TAHUN 2018 ; 177 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018

ABSTRAK : - Bahwa perubahan RKPD menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Lampung Timur TA. 2018

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 28 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 66 Tahun 2001, PP No 18 Tahun 2016, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No 32 Tahun 2017, Permendagri No 33 Tahun 2017, Perda Provinsi Lampung No 06 Tahun 2014, Perda No 10 Tahun 2010, Perda No 15 Tahun 2016, Perda No 18 Tahun 2016, Perda No 12 Tahun 2017

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2018

PERBUP NOMOR 33 TAHUN 2018, 9 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR BERBASIS E-PLANNING

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perlu dikembangkan dan diterapkan Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Berbasis Online (e-planning)
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 8 Tahun 2008, PP No 18 Tahun 2016, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No 22 Tahun 2018, Permendagri No 38 Tahun 2018, Perda Provinsi Lampung No 06 Tahun 2014, Perda No 10 Tahun 2010, Perda No 15 Tahun 2016, Perda No 18 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Maksud pengelolaan e-planning, tujuan perbup, pengelolaan e-planning, pengendalian dan evaluasi, pembiayaan
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018

PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

2018

PERBUP NOMOR 34 TAHUN 2018, 25 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2016

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perlu dikembangkan dan diterapkan Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Berbasis Online (e-planning)
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 23 Tahun 2005, PP No 74 Tahun 2012, PP No 58 Tahun 2005, Permendagri No 13 Tahun 2006, Kepmenkes No 128/Menkes/SK/II/2004, Kepmendagri No 245 Tahun 2004, Perda No 02 Tahun 2009, Perda No 25 Tahun 2011, Perda No 17 Tahun 2016, Perda No 18 Tahun 2016, Perbup No 32 Tahun 2012, Perbup No 25 Tahun 2013,

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Beberapa ketentuan diubah yakni Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018

PEDOMAN PENYUSUNAN APBD

2018

PERBUP NOMOR 35 TAHUN 2018, 65 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2019
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 24 Tahun 2004, PP No 23 Tahun 2005, PP No 30 Tahun 2011, PP No 55 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 65 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 71 Tahun 2010, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 32 Tahun 2011, Permenkeu No 45/PMK.05/2007 Tahun 2018, Permendagri No 38 Tahun 2018, Perda No 02 Tahun 2009.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kebijakan pemerintah; prinsip penyusunan APBD; Kebijakan penyusunan APBD; teknis penyusunan APBD; hal-hal khusus lainnya

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober 2018

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

2018

PERBUP NOMOR 36 TAHUN 2018, 4 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (16) dan ayat (17) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 9 Tahun 2015, PP No 18 Tahun 2016, PP No 11 Tahun 2017, Permendagri No 80 Tahun 2015, Permen PAN & RB No 25 Tahun 2016, Permendagri No 12 Tahun 2017, Perda No 18 Tahun 2016, Perbup No 42 Tahun 2017, Perbup Nomor 08 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Ketentuan Pasal 109 B dan Pasal 109 C diubah
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober 2018

PEJABARAN PERUBAHAN APBD

2018

PERBUP NOMOR 38 TAHUN 2018, 28 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabuapten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2018

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 24 Tahun 2004, PP No 23 Tahun 2005, PP No 30 Tahun 2011, PP No 55 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 65 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 71 Tahun 2010, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 32 Tahun 2011, Permenkeu No 45/PMK.05/2007 Tahun 2018, Permendagri No 38 Tahun 2018, Perda No 02 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Berisi rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018

PESERTA UMRAH DAN WISATA ROHANI

2018

PERBUP NOMOR 39 TAHUN 2018, 5 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN PESERTA UMRAH DAN WISATA ROHANI YANG DIBIYAI OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi pejabat dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur perlu diselenggarakan ibadah umrah dan wisata rohani.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 14 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2014, UU Nomor 09 Tahun 2015, Permenag No 8 Tahun 2018, Perda No 12 Tahun 2017, Perda No 18 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Maksud, tujuan dan sasaran; ruang lingkup; pedoman umum; pedoman umum peserta umrah dan wisata rohani; tata cara pendaftaran calon peserta; mekanisme penetapan calon peserta; tim seleksi dan tugas tim seleksi; pelaksanaan umrah dan wisata rohani; pembiayaan
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2018

PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

2018

PERBUP NOMOR 40 TAHUN 2018, 8 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG TATA CARA
PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

ABSTRAK : - Bahwa dengan semakin kompleksnya permasalahan yang Kabupaten Lampung Timur perlu diselenggarakan ibadah umrah dan wisata rohani.

Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :

- UU No 12 Tahun 1999, UU No 14 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2014, UU Nomor 09 Tahun 2015, Permenag No 8 Tahun 2018, Perda No 12 Tahun 2017, Perda No 18 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :

- Maksud, tujuan dan sasaran; ruang lingkup; pedoman umum; pedoman umum peserta umrah dan wisata rohani; tata cara pendaftaran calon peserta; mekanisme penetapan calon peserta; tim seleksi dan tugas tim seleksi; pelaksanaan umrah dan wisata rohani; pembiayaan

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2018

PEMBANGUNAN E-WASDA

2018

PERBUP NOMOR 41 TAHUN 2018, 13 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBANGUNAN E-WASDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa perkembangan teknologi informasi belum dimanfaatkan secara maksimal dalam menunjang penyelenggaraan administrasi perkantoran secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 11 Tahun 2008, UU No 14 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2014, UU No 9 Tahun 2015, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP No 82 Tahun 2012, PP No 18 Tahun 2016, Permen Pan & RB No 80 Tahun 2012, Perda No 18 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Maksud, tujuan; ruang lingkup; kedudukan, organisasi dan tugas; pengamanan data; perubahan/perbaikan database; pembinaan dan pengawasan; pelaporan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2018

PENILAIAN PENGENDALIAN PEMANTAUAN RESIKO

2018

PERBUP NOMOR 42 TAHUN 2018, 21 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENILAIAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN RESIKO DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara/daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu menerapkan penilaian dan pengendalian resiko dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, UU Nomor 9 Tahun 2015, PP 79 Tahun 2005, PP No 60 Tahun 2008, PP No 18 Tahun 2016, Permenag No 110 Tahun 2017, Perda No 12 Tahun 2004, Perda No 18 Tahun 2016, Perbup No 21 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Tujuan dan manfaat penerapan penilaian, pengendalian dan pemantauan resiko; Penerapan penilaian, pengendalian dan pemantauan resiko; pemilik resiko dan pengorganisasian.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2018

PENDELEGASIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

2018

PERBUP NOMOR 43 TAHUN 2018, 11 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau dipandang perlu mengatur pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 2007, UU No 25 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 96 Tahun 2012, Perpres No 24 Tahun 2018, Perpres No 97 Tahun 2014, Perpres 91 Tahun 2017, Permendagri 138 Tahun 2017, Permen Pariwisata No 10 Tahun 2018, Permen Koperasi UKM No 11 Tahun 2018 , Permen PUPR No 19/PRT/M/2018, Permen P&K No 25 Tahun 2018, Permenkes No 26 Tahun 2018, Permentan No 29/PERMENTAN/pp.210/7/2018
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
 - Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2018

E-DATABASE BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

2018

PERBUP NOMOR 44 TAHUN 2018, 14 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENYUSUNAN E-DATABASE BIDANG JALAN DAN JEMBATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa perkembangan teknologi informasi belum dimanfaatkan secara maksimal dalam menunjang penyelenggaraan administrasi perkantoran secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan E-Database Bidang Jalan dan Jembatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 11 Tahun 2008, UU No 14 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2014, UU No 09 Tahun 2015, UU No 30 Tahun 2014, PP No 61 Tahun 2010, PP No 82 Tahun 2012, PP No 18 Tahun 2016 , Permen PAN RB No 80 Tahun 2012, Perda No 18 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Asas tujuan; perencanaan; pelaksanaan; pengendalian; pelaporan; pengamanan data; perubahan perbaikan database; pembinaan dan pengawasan; pelaporan
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2018

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

2018

PERBUP NOMOR 45 TAHUN 2018, 73 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UPTD DINAS KESEHATAN

- ABSTRAK : - Bahwa agar pembentukan Badan Layanan Umum Daerah dapat mencapai tujuan dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktek bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu menetapkan pedoman pembentukan dan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 23 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 71 Tahun 2010, PP No 27 Tahun 2014, Permendagri No 19 Tahun 2016, Permendagri No 79 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Asas tujuan; Persyaratan, Penetapan, dan Pencabutan; Sumber Daya Manusia dan Remunerasi; Struktur Anggaran BLUD; Perencanaan dan

Penganggaran; Pelaksanaan Anggaran; Pengelolaan Belanja; Pengelolaan Barang; Tarif Layanan BLUD; Piutang dan Utang/Pinjaman; Kerjasama BLUD; Investasi, Sisa Lebih Perhitungan dan Defisit Anggaran; Penyelesaian Kerugian; Pelaporan dan Pertanggungjawaban

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2018

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS

2018

PERBUP NOMOR 47 TAHUN 2018, 42 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG POLA TATA KELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSKESMAS DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ABSTRAK : - Bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas, sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kesehatan masyarakat guna meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan, sehingga UPT Dinas Puskesmas dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan menjadi pelopor pembangunan berwawasan kesehatan

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 23 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 71 Tahun 2010, PP No 27 Tahun 2014, Permendagri No 19 Tahun 2016, Permendagri No 79 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Asas tujuan; Prinsip Tata kelola; Kebijakan Dasar UPTD Puskesmas; Pola Tata Kelola; Prosedur Kerja; Pengelompokan Fungsi; Manajemen BLUD UPTD Puskesmas; Pembinaan dan Pengawasan

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2018

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

2018

PERBUP NOMOR 48 TAHUN 2018, 17 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK :
- Bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, diabetes dan lain-lain.
 - Bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku kearah yang lebih sehat yang dilakukan secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 36 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, Permenkes No 39 Tahun 2016, Pergub Lampung No 38 Tahun 2017, Perda No 18 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Maksud tujuan dan sasaran; Ruang Lingkup; Pelaksanaan; Kelembagaan; Mekanisme pengawasan dan pelaporan; penganggaran;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018

PENURUNAN STUNTING

2018

PERBUP NOMOR 49 TAHUN 2018, 12 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENURUNAN STUNTING

- ABSTRAK : - Bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Lampung Timur sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh factor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1000 hari pertama kehidupan
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 36 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 28 Tahun 2004; PP No 33 Tahun 2012; Perpres No 42 Tahun 2013; Permenkes No 33 Tahun 2012, Permenkes
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Maksud tujuan dan sasaran; Ruang Lingkup; Pelaksanaan; Kelembagaan; Mekanisme pengawasan dan pelaporan; penganggaran;
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018

PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

2018

PERBUP NOMOR 50 TAHUN 2018, 17 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK :
- Bahwa standard pelayanan minimal bidang kesehatan disusun untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar sebagai salah satu upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Permenkes Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sesuai dengan standard pelayanan minimal bidang kesehatan
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 25 Tahun 2004, UU No 29 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 36 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, UU No 36 Tahun 2014, PP No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP 46 Tahun 2014; Permendagri 13 Tahun 2006, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 18 Tahun 2016, Permenkes No 001 Tahun 2012; Permenkes No 71 Tahun 2013, Permenkes No 30 Tahun 2014, Permenkes No 75 Tahun 2014, Permenkes No 46 Tahun 2015, Permenkes No 43 Tahun 2016, Permenkes No 45 Tahun 2016, Permendagri No 79 Tahun 2018,

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Maksud tujuan dan sasaran; SPM Bidang Kesehatan;
Mekanisme Pelaksanaan; Penyelenggaraan;
Pengembangan Kapasitas; pengembangan kapasitas;
pembiayaan; pembinaan dan pengawasan; monitoring
dan evaluasi; pelaporan

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018

PERJALANAN DINAS

2018

PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2018, 14 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa guna memenuhi kaidah dalam pengelolaan, penganggaran perjalanan dinas harus memperhatikan aspek yuridis, transparansi, akuntabilitas, efektifitas, kepatuhan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan nyata serta dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan APBD, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 1 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2017; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 21 Tahun 2011, Perda No 02 Tahun 2009
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018

PENJABARAN APBD

2018

PERBUP NOMOR 52 TAHUN 2018, 6 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK : - Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 20 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 109 Tahun 2000; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2008, PP No 8 Tahun 2006, PP No 5 Tahun 2009, PP No 71 Tahun 2010, PP 30 Tahun 2011, Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 133 Tahun 2017, Permendagri No 38 Tahun 2018, Perda No 02 Tahun 2009
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
APBD Tahun Anggaran 2019 berupa pendapatan daerah dan belanja daerah

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSTAMAAN GENDER

2018

PERBUP NOMOR 53 TAHUN 2018, 12 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSTAMAAN GENDER KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 – 2020

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 , dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender (RAD-PUG) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018 - 2020.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 23 Tahun 2014, PP No 109 Tahun 2000; PP No 24 Tahun 2004; PP No 8 Tahun 2008, Perpres No 2 Tahun 2015, Permendagri No 15 Tahun 2008; Permen PP dan PA No 5 Tahun 2014, Perda No 15 Tahun 2016, Perda No 18 Tahun 2016
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018

STANDAR BIAYA MASUKAN

2018

PERBUP NOMOR 54 TAHUN 2018, 27 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan RKA/RKAP-SKPD agar terlaksanan dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Lampung Timur.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 5 Tahun 2009, PP No 71 Tahun 2010, PP 18 Tahun 2016, Permendagri No 13 Tahun 2006; Permekeu No 110/PMK.05/2010, Permenkeu No 32/PMK.02/2018, Perda No 02 Tahun 2009, Perda No 18 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Satuan biaya berupa harga satuan, tariff dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018

RENCANA STRATEGIS DINAS

2018

PERBUP NOMOR 55 TAHUN 2018, 78 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 – 2021

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/ diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Lampung Timur sebagai penjabaran visi, misi Bupati terpilih selama 5 (lima) tahun, maka perlu ditetapkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2020.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 65 Tahun 2005, PP No 18 Tahun 2016, PP No 5 Tahun 2009, PP No 71 Tahun 2010, PP 18 Tahun 2016, Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 54 Tahun 2010, Perda Prop No 06 Tahun 2014, Perda No 10 Tahun 2010, Perda 04 Tahun 2012, Perda No 15 Tahun 2016, Perda No 18 Tahun 2016, Perda No 68 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Lampung Timur

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018

PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

2018

PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2018, 5 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DESA SEBAGAI KOORDINATOR DAN CAMAT SEBAGAI PENGAWAS DALAM HAL PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung percepatan, peningkatan dan pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lampung Timur dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penunjukan Kepala Desa sebagai Koordinator dan Camat sebagai Pengawas dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 2009, UU No 28 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, PP No 69 Tahun 2010, Perda No 16 Tahun 2011, Perda No 16 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Tugas dan Tanggungjawab Kepala Desa dan Camat sebagai pengawas dalam hal pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018